

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya globalisasi, semakin mempengaruhi bisnis di Indonesia. Perusahaan-perusahaan asing turut masuk dan berkembang di tanah air. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan dalam negeri menjadi terpacu untuk bersaing di dunia bisnis. Seluruh perusahaan meningkatkan aktivitasnya mulai dari keuangan, produksi hingga pemasaran. Banyak perusahaan berlomba-lomba menciptakan laba yang besar dengan produksi dan pemasaran yang juga berlomba-lomba untuk menguasai pasar (Wulandari, 2017)[1]. Peningkatan aktivitas ini bukan hanya untuk mempertahankan eksistensi perusahaan namun juga untuk menarik banyak investor untuk berinvestasi demi memodali keberlangsungan aktivitas perusahaan. Investor berminat dengan perusahaan yang menghasilkan laba konstan atau bahkan meningkat, sehingga banyak perusahaan yang berupaya untuk menciptakan laba sedemikian rupa agar memperoleh perhatian khusus dari para investor (Widianto, 2011)[2].

Semakin meningkatnya aktivitas produksi perusahaan maka semakin banyak proses yang bisa berdampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif tersebut di antaranya pencemaran sungai akibat sisa limbah yang dibuang tanpa diolah terlebih dahulu, penumpukan sampah akibat hasil produksi yang gagal, hingga sisa bahan tidak terpakai yang dibuang begitu saja tanpa mengkaji ulang pemanfaatannya (Kusumaningtyas, 2013)[3]. Tidak hanya kepada lingkungan, aktivitas produksi yang meningkat juga membuat perusahaan membutuhkan tenaga yang lebih banyak dari para karyawannya sehingga banyak keluhan akibat aktivitas lembur yang tidak teratur dan pembayaran upah lembur yang tidak transparan (Ko dan Choi, 2018)[4]. Para pemangku kepentingan mulai dari investor, pemerintah, hingga masyarakat merasakan dampak tersebut sehingga berharap bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa melakukan penanganan khusus terhadap dampak negatif tersebut.

Dari hal tersebut, para pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan mulai berorientasi pada konsep *triple bottom line*, di mana pandangan sebuah perusahaan yang ingin berkelanjutan (*sustainable*) harus memperhatikan “3P” (*profit, people and planet*). Selain mengejar laba (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) (Elkington, 2004)[5]. Hal ini menjadi pengumuman khusus bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan pertanggungjawaban sosial perusahaan sebagai bentuk bukti pertanggungjawaban atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh para pemangku kepentingan (Felisia, 2014)[6].

Akuntansi melihat bagaimana perusahaan melakukan aktivitasnya dalam menciptakan laba. Akuntansi meneliti dampak lain dari usaha perusahaan dalam mempertahankan eksistensinya di pasar dan di mata investor. Ternyata dari aktivitas yang sedemikian rupa, perusahaan hanya memperhatikan cara menghasilkan laba bukan prosesnya sehingga dapat diketahui bahwa aktivitas perusahaan yang berorientasi pada laba ini tidak pernah mempertimbangkan lingkungan sekitarnya termasuk pegawai, masyarakat, dan ekosistem yang di sekitar perusahaan. Oleh sebab itu, akuntansi mengembangkan sebuah ilmu yaitu akuntansi lingkungan yang mempelajari bagaimana memasukkan biaya-biaya yang memiliki manfaat finansial dan non-finansial terhadap lingkungan, tenaga kerja, dan masyarakat. Menurut Pratiwi dan Wuryani (2013)[7], akuntansi lingkungan berperan dalam memberikan tambahan informasi melalui pengungkapan (*disclosure*) wajar atau dalam data kuantitatif pada komponen laporan keuangan yang diterbitkan secara berkala serta menunjukkan kegiatan dan hasil operasional perusahaan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Akuntansi lingkungan berkembang dan dikenal dengan istilah CSR (*Corporate Social Responsibility*). Di Indonesia, CSR diatur dalam Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam bab V pasal 74[8]. Pada pasal 74 no. 1 disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan. Kemudian pemerintah memperlengkapi peraturan mengenai CSR dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Terbatas. Pengungkapan CSR dilampirkan dalam laporan tahunan perusahaan yang diterbitkan setiap tahunnya.

Tahun 2000, GRI (*Global Reporting Initiative*) mengeluarkan struktur mengenai pelaporan keberlanjutan perusahaan yang mencakup CSR dengan menggunakan *sustainability report* (laporan keberlanjutan) yang kemudian dipakai oleh banyak perusahaan besar di seluruh negara. *Sustainability report* merupakan sebuah laporan yang mencerminkan pertanggungjawaban perusahaan terhadap keadaan ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan di masa sekarang dan di masa mendatang. Standar pembuatan *sustainability report* yang dibuat oleh GRI mencakup kategori ekonomi, lingkungan, dan sosial yang menjadi acuan perusahaan untuk bisa diungkapkan ke publik. Namun, tidak semua perusahaan mengungkapkan semua indikator tersebut dan hanya beberapa poin saja.

*Sustainability Report* merupakan laporan yang terpisah dari laporan tahunan. Tujuan dari pembuatan *sustainability report* adalah untuk mengomunikasikan komitmen dan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat luas secara transparan (GRI, 2013)[9]. Melalui laporan ini, para pemangku kepentingan bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terbuka mengenai segala kegiatan

pembangunan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan-perusahaan berupaya membuat *sustainability report* sebagai bentuk pertanggungjawaban dan juga komitmen perusahaan terhadap isu sosial dan lingkungan. Namun masih banyak perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* hanya demi kepentingan citra perusahaan agar tetap memperoleh legitimasi dari masyarakat sekitar dan juga kepada para *stakeholder* dalam hal menjaga kepercayaan serta meningkatkan hubungan baik (Wulandari, 2017)[10].

Berdasarkan data yang diterbitkan tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada situsnya [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)[11], jumlah emiten yang menerbitkan laporan keberlanjutan hingga tahun 2017 hanya 49 emiten. 49 emiten ini terdiri dari perusahaan *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tabel 1.1

Jumlah Emiten Berdasarkan Sektor yang Menerbitkan *Sustainability Report*

No	Sektor	Jumlah perusahaan	Penerbit <i>Sustainability Report</i>	%
1	Pertanian	19	3	15.79
2	Pertambangan	46	10	21.74
3	Industri Dasar dan Kimia	67	4	5.97
4	Aneka Industri	42	3	7.14
5	Industri Barang Konsumsi	46	2	4.35
6	Properti, <i>Real Estate</i> , dan Bangunan	66	6	9.09
7	Infrastuktur, Utilitas, dan Transportasi	62	7	11.29
8	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	134	0	0
9	Keuangan	86	14	16.28
	TOTAL	568	49	8.63

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan bahwa dari seluruh total perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu 568 perusahaan, hanya ada 49 perusahaan (8.63%) yang mau menerbitkan *sustainability report* secara independen. Hal ini mau menunjukkan bahwa perusahaan masih belum memahami seluruhnya mengenai manfaat dari penerbitan *sustainability report* yang merupakan bentuk laporan dari pertanggungjawaban perusahaan atas kondisi ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan. Hal ini juga bisa disebabkan karena di Indonesia, *sustainability report* masih bersifat sukarela sehingga belum semua perusahaan bersedia menerbitkan laporan keberlanjutan secara independen (sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))[12]. Jika ada yang menerbitkan *sustainability report*, maka diumumkan dan diterbitkan melalui situs perusahaan masing-masing bahkan ada yang membuat *sustainability report* turut digabung dalam laporan tahunan perusahaan (*combined report*) seperti laporan tahunan PT Timah Tbk dan PT Elnusa Tbk.

Peneliti mengambil perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2017 untuk dianalisis.

Perusahaan pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang no. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia no. 34 tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang no. 4 tahun 2009 pasal 1 angka 4 [13] menyatakan bahwa pertambangan adalah rangkaian penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan paska tambang yang dilakukan sampai akhir atau hanya setengah tahap. Pertambangan merupakan perusahaan yang memiliki karakter *high risk* atau disebut juga perusahaan yang beresiko tinggi. Resiko-resiko yang dihadapi oleh perusahaan pertambangan yaitu resiko lingkungan berupa limbah pengolahan bahan tambang, resiko legitimasi, resiko reklamasi, resiko kecelakaan kerja, hingga resiko gagal tambang.

Permasalahan ekonomi dari sektor pertambangan yaitu masalah PT Bayan Resources Tbk yang menggunakan Sungai Kedang sebagai jalur ponton batubara sehingga menyebabkan pendapatan masyarakat sekitar berupa ikan dari sungai menjadi berkurang akibat populasi ikan di sungai juga banyak yang mati (sumber : [www.jatam.org](http://www.jatam.org))[14]. Permasalahan ekonomi secara garis besar bermula dari masalah lingkungan yang dibuat oleh perusahaan tambang. Permasalahan lingkungan dari sektor pertambangan yaitu masalah limbah *tailing* (limbah batuan dan tanah dari hasil sisa penggerusan aktivitas pertambangan). Masalah ini menyangkut PT Freeport Indonesia sehingga membuat proses akuisisinya melambat (sumber : [www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com))[15]. Masalah lingkungan dari bidang pertambangan juga banyak terjadi termasuk pembuangan limbah tambang ke sungai tanpa diolah sehingga menimbulkan pencemaran sungai seperti di Lebak (sumber : [www.bantenhits.com](http://www.bantenhits.com))[16], pembukaan lokasi tambang yang ilegal (sumber : [detik.com](http://detik.com))[17], dan lubang sisa aktivitas tambang yang banyak terbengkalai di Kalimantan (sumber : [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id))[18] sehingga banyak mengakibatkan korban jiwa.

Permasalahan sosial dari sektor pertambangan yang paling terkenal adalah konflik antara PT Freeport Indonesia dengan masyarakat Papua, yang mana perusahaan dianggap tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua akibat tanah milik mereka terus menerus digerus dan melanggar hak adat dari masyarakat Papua, khususnya suku Amongme dan suku Kamoro yang memiliki hak ulayat dari tanah yang digunakan perusahaan (sumber : [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com))[19]. Tidak hanya di Papua, kasus pelanggaran hak ulayat dari adat tertentu juga terjadi di Bengkulu akibat PT Citra Selaras Buana mendapat izin dari pemerintah untuk melakukan tambang dengan sistem bawah tanah namun masyarakat tidak mengizinkan lahannya digali secara tertutup (sistem bawah tanah) (sumber : [www.kompas.com](http://www.kompas.com))[20]. Selain dari segi pelanggaran hak adat, berbagai kasus kematian akibat lubang sisa tambang yang

terbengkalai di Kalimantan juga ditanggapi dengan lalai oleh perusahaan dan pemerintah setempat (sumber : [www.jatam.com](http://www.jatam.com))[21].

Terkait pengungkapan *sustainability report*, perusahaan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*. Peneliti mengambil tiga variabel ini sebagai variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya yaitu *sustainability report*.

Pertama, ukuran perusahaan menjadi pertimbangan. Hal ini karena semakin besar volume aktivitas perusahaan maka semakin banyak perhatian yang didapat sehingga perusahaan harus melampirkan laporan keuangannya secara transparan beserta *sustainability report* sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran perusahaan dalam menghasilkan laba, memperhatikan kesejahteraan pegawai, dan merawat lingkungan yang terkena dampak dari operasional perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin dituntut untuk mengungkapkan pertanggungjawabannya terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam bentuk *sustainability report* (Wulandari, 2017)[22]. Perusahaan besar dengan penggunaan sumber daya alam dalam jumlah besar memiliki kemungkinan untuk meningkatkan skala dan ruang lingkup pengungkapan dari aktivitas lingkungan mereka (Shaer et al., 2017)[23]. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perusahaan yang menggunakan sumber daya alam secara optimal dan dalam skala besar, harus mampu mengungkapkan aktivitas lingkungan mereka dan menjaga keberlangsungan sumber daya alam yang digunakan untuk generasi mendatang.

Ukuran perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sales growth*. Pertumbuhan penjualan yang positif cenderung menunjukkan bahwa volume penjualan meningkat dari tahun sebelumnya. Volume penjualan yang meningkat menunjukkan aktivitas produksi yang meningkat. Aktivitas produksi yang meningkat menyebabkan penggunaan lahan lebih banyak dan memiliki dampak yang lebih besar dari aktivitas sebelumnya. Seharusnya, semakin tinggi tingkat *sales growth* maka semakin sadar perusahaan akan tanggungjawabnya terhadap kondisi ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan, sehingga yang diungkap dalam *sustainability report* lebih banyak dari sebelumnya.

Tabel 1.2

Perbandingan *Sales Growth* dengan Tingkat Pengungkapan *Sustainability Report*

No	Kode	Tingkat <i>Sales Growth</i> 2016	Tingkat pengungkapan <i>sustainability report</i>	Tingkat <i>Sales Growth</i> 2017	Tingkat pengungkapan <i>sustainability report</i>
1	BUMI	-0.4380	50 poin	-0.2508	18 poin
2	INDY	-0.3524	12 poin	0.4291	10 poin
3	ITMG	-0.2113	25 poin	0.2458	12 poin
4	PTBA	0.0237	50 poin	0.3850	21 poin
5	PTRO	-0.0140	12 poin	0.2515	13 poin
6	ELSA	-0.0410	25 poin	0.3752	16 poin

7	MEDC	-0.1243	31 poin	0.5547	31 poin
8	ANTM	-0.1353	31 poin	0.3896	35 poin
9	INCO	-0.3220	8 poin	0.0863	13 poin
10	TINS	0.0137	58 poin	0.3227	45 poin

Sumber : data diolah

Tabel 1.2 dibuat oleh peneliti berdasarkan kelompok perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* secara independen. Dari tabel 1.2 diperoleh informasi bahwa 6 dari 10 perusahaan yang memiliki tingkat *sales growth* yang positif cenderung lebih mengurangi tingkat pengungkapan *sustainability report*. Hal ini menunjukkan pengaruh negatif dari *sales growth* terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report*. Perusahaan tersebut antara lain PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Indika Energy Tbk (INDY), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Elnusa Tbk (ELSA), dan PT Timah Tbk (TINS). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan yang positif tidak membuat perusahaan memiliki keinginan untuk semakin transparan dalam mengungkapkan informasi yang dimiliki.

Kedua, profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva (ROA) maupun modal sendiri (ROE) (Kasmir, 2014:114)[24]. Sumber daya yang digunakan perusahaan merupakan asset perusahaan (Shaer et al., 2017)[25]. Nasir et al. (2014)[26], mengungkapkan bahwa profitabilitas memiliki hasil positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin tinggi inisiatif perusahaan dalam mengungkapkan *sustainability report* yang mencerminkan tanggung jawab perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang ada demi memperoleh laba operasional yang tinggi. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi harus mampu menunjukkan hasil dari profitabilitasnya tersebut melalui laporan keberlanjutan.

Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *return on asset* (ROA). Tingkat ROA yang positif menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan asset lebih efektif dan menghasilkan laba operasional yang tinggi. Penggunaan asset berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan bahkan dari lingkungan sekitar tempat perusahaan beroperasi (Aniktia dan Khafid, 2015)[27]. Semakin tinggi ROA maka menunjukkan semakin tinggi laba operasional yang dihasilkan perusahaan, sehingga menuntut perusahaan untuk melaporkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dan cara perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan sumber daya tersebut di masa mendatang. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat ROA maka semakin tinggi tingkat pengungkapan *sustainability report*.

Tabel 1.3  
Perbandingan ROA dengan Tingkat Pengungkapan *Sustainability Report*

No	Kode	Tingkat ROA 2016	Tingkat pengungkapan <i>sustainability report</i>	Tingkat ROA 2017	Tingkat pengungkapan <i>sustainability report</i>
1	BUMI	-0.0017	50 poin	-0.0057	18 poin
2	INDY	-0.0631	12 poin	0.0825	10 poin
3	ITMG	0.1587	25 poin	0.2665	12 poin
4	PTBA	0.1362	50 poin	0.2683	21 poin
5	PTRO	-0.0224	12 poin	0.0247	13 poin
6	ELSA	0.1015	25 poin	0.0694	16 poin
7	MEDC	0.0724	31 poin	0.0573	31 poin
8	ANTM	0.0003	31 poin	0.0200	35 poin
9	INCO	0.0064	8 poin	-0.0070	13 poin
10	TINS	0.0435	58 poin	0.0603	45 poin

Sumber : data diolah

Tabel 1.3 dibuat oleh peneliti berdasarkan kelompok perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* secara independen. Dari tabel 1.3 diperoleh informasi bahwa 4 dari 10 perusahaan dengan tingkat ROA yang meningkat positif memiliki tingkat pengungkapan *sustainability report* yang cenderung menurun. Perusahaan tersebut adalah PT Indika Energy Tbk (INDY), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat ROA yang tinggi dengan laba operasional yang menguntungkan, tidak membuat perusahaan berkeinginan untuk menampilkan informasi yang lebih transparan mengenai proses perolehan laba operasional tersebut. Sedangkan 2 dari 10 perusahaan dengan tingkat ROA yang positif, memiliki tingkat pengungkapan *sustainability report* yang cenderung meningkat. Perusahaan tersebut adalah PT Petrosea Tbk (PTRO) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Hal ini menunjukkan pengaruh positif dari ROA terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report*.

Selain itu, 2 dari 10 perusahaan dengan tingkat ROA yang negatif yaitu PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan PT Elnusa Tbk (ELSA) cenderung mengurangi pengungkapan pada *sustainability report*. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki laba operasional yang rendah memilih untuk mengurangi beban-beban pertanggungjawaban ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan. Berbeda dengan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang memiliki tingkat ROA negatif pada tahun 2017 namun tidak mengesampingkan pertanggungjawabannya dan memiliki tingkat pengungkapan yang meningkat dari tahun sebelumnya.

Ketiga, *Leverage*, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva maupun ekuitas perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva

maupun ekuitasnya (Kasmir, 2014:150)[28]. Dana yang diperoleh perusahaan untuk beroperasi tidak seluruhnya dari modal sendiri dan saham melainkan juga dari pinjaman yang bisa diperoleh dari lembaga bank maupun non bank. Nasir et al. (2014)[29] menemukan hasil bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap pengungkapan *sustainability report*. Karena tingkat *leverage* hanya dibutuhkan oleh investor untuk mengukur kemampuan pelunasan hutang dari perusahaan dan pelunasan tersebut tidak bergantung pada pengungkapan *sustainability report*. Penelitian ini berbeda dengan Fahriza (2014)[30] yang menyatakan bahwa tingkat *leverage* yang tinggi menggambarkan kemampuan finansial perusahaan yang rentan dan beresiko tinggi karena aktivitas operasi perusahaan sangat bergantung dengan kewajiban jangka panjangnya dan tingginya kewajiban yang ditanggung mengharuskan perusahaan untuk lebih efektif dan efisien dalam mengalokasikan beban operasionalnya sehingga mengurangi beban pertanggungjawaban sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* mempengaruhi seberapa banyak pengungkapan *sustainability report* yang dilakukan bahkan dikurangi untuk memiliki kemampuan melunasi hutang lebih besar.

*Leverage* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *debt to equity ratio* (DER). DER membandingkan total hutang dengan total modal yang dimiliki perusahaan. Bagi kreditor semakin besar rasio ini akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan kredit yang mungkin terjadi di perusahaan (Kasmir, 2014:158)[31]. Investor juga cenderung menghindari risiko yang timbul dari tingginya rasio ini. Semakin besar *leverage* suatu perusahaan menunjukkan risiko investasi yang semakin besar pula (Hery, 2017:12)[32]. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan bisa mengurangi beban-beban demi meningkatkan arus kas untuk pelunasan hutang-hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Beban tersebut termasuk beban pertanggungjawaban perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan.

Tabel 1.4

Perbandingan DER dengan Tingkat Pengungkapan *Sustainability Report*

No	Kode	Tingkat DER 2016	Tingkat pengungkapan <i>sustainability report</i>	Tingkat DER 2017	Tingkat pengungkapan <i>sustainability report</i>
1	BUMI	-2.1100	50 poin	11.9100	18 poin
2	INDY	1.4600	12 poin	2.2600	10 poin
3	ITMG	0.3300	25 poin	0.4200	12 poin
4	PTBA	0.7600	50 poin	0.5900	21 poin
5	PTRO	1.3100	12 poin	1.4500	13 poin
6	ELSA	0.4600	25 poin	0.5900	16 poin
7	MEDC	3.0400	31 poin	2.6800	31 poin
8	ANTM	0.6300	31 poin	0.6200	35 poin
9	INCO	0.2100	8 poin	0.2000	13 poin

10	TINS	0.6900	58 poin	0.9600	45 poin
----	------	--------	---------	--------	---------

Sumber : data diolah

Tabel 1.4 dibuat oleh peneliti berdasarkan kelompok perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* secara independen. Dari tabel 1.4 diperoleh informasi bahwa 5 dari 10 perusahaan dengan tingkat DER yang tinggi dan meningkat dari tahun sebelumnya, cenderung mengurangi tingkat pengungkapan *sustainability report*. Hal ini menunjukkan pengaruh negatif dari DER terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report*. Perusahaan tersebut yaitu PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Indika Energy Tbk (INDY), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Elnusa Tbk (ELSA), dan PT Timah Tbk (TINS). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung mengurangi beban pertanggungjawaban demi bisa mengurangi hutang di masa mendatang.

2 dari 10 perusahaan menunjukkan hubungan positif, yang mana tingkat DER menurun membuat tingkat pengungkapan *sustainability report* meningkat. Perusahaan tersebut adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Sedangkan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) cenderung mengurangi tingkat pengungkapan *sustainability report* meski tingkat DER nya menurun. Berbeda dengan PT Petrosea Tbk (PTRO) memiliki tingkat DER yang meningkat dari tahun sebelumnya namun tidak mengurangi pengungkapan *sustainability report*.

Faktor-faktor di atas sebenarnya sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti dan diterbitkan dalam jurnal. Namun, masih banyak ketidakkonsistenan hasil sehingga banyak persepsi berbeda terhadap hal-hal yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Banyaknya perbedaan hasil penelitian terhadap pengungkapan *sustainability report* juga menjadi salah satu motivasi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*.

Nasir et al. (2014)[33] mengungkapkan bahwa profitabilitas, *leverage*, dan tata kelola memiliki pengaruh positif yang artinya ketiga variabel tersebut mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Penelitian ini didukung oleh Nadyawati (2018)[34] yang mengemukakan hasil bahwa profitabilitas dan *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2015)[35] juga menemukan hasil bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Namun ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin besar tanggung jawab perusahaan untuk menunjukkan proses dari pencapaian laba yang tinggi dari penggunaan asset yang ada. Penggunaan dana dari pihak eksternal seperti investor juga dipertimbangkan dalam pengungkapan *sustainability report* untuk menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan praktik pengurangan biaya atas pertanggungjawaban lingkungan dan sosial demi memiliki dana yang lebih besar untuk melunasi hutang.

Berbeda dengan Savina et al. (2018)[36] mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan dan *leverage* memiliki pengaruh positif sedangkan profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal ini berarti yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* adalah ukuran perusahaan dan *leverage* bukan profitabilitas. Wulandari (2017)[37] mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif sedangkan profitabilitas dan *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka harus melakukan pengungkapan *sustainability report* lebih rinci dan luas. Sedangkan profitabilitas dan *leverage* tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Fahriza (2014)[38] menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* sedangkan profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Penelitian ini menunjukkan bahwa hanya *leverage* yang memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* bukan profitabilitas maupun ukuran perusahaan. Penelitian ini didukung oleh Aniktia dan Khafid (2015)[39] yang mengemukakan hasil bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif sedangkan profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Ketujuh penelitian tersebut sangat berkontradiksi dengan penelitian Shaer et al. (2017)[40] yang mengungkapkan bahwa kualitas pengungkapan *sustainability report* lebih dipertimbangkan daripada kuantitas pengungkapan *sustainability report*. Kualitas yang dimaksud adalah opini audit terhadap perusahaan termasuk ukuran perusahaan sedangkan kuantitas dianalisis dari *leverage* dan profitabilitas. Hal ini berarti bahwa opini audit lebih dipertimbangkan untuk pengungkapan *sustainability report* daripada tingkat *leverage* maupun profitabilitas.

Oleh sebab itu, penulis akan meneliti “Pengaruh *Sales Growth*, *Return on Asset*, dan *Debt to Equity Ratio* terhadap Tingkat Pengungkapan *Sustainability Report*”, untuk mengkaji lebih dalam bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* memiliki pengaruh dalam pengungkapan *sustainability report* dengan melakukan studi pada sektor pertambangan yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 sampai 2017.

## 1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

### 1.2.1. Identifikasi Masalah

1. *Sustainability report* masih bersifat sukarela sehingga banyak perusahaan yang tidak mengungkapkannya secara independen (terpisah dari laporan tahunan) sehingga masih digabung dengan laporan tahunan.
2. Gangguan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar daerah pertambangan yang pernah diakibatkan oleh sebuah perusahaan terbuka yang menggunakan

Sungai Kedang sebagai jalur ponton batubara sehingga menyebabkan pendapatan masyarakat sekitar berupa ikan dari sungai menjadi berkurang dan populasi ikan di sungai juga banyak yang mati

3. Masalah lingkungan dari bidang pertambangan juga banyak terjadi yaitu limbah *tailing* (limbah batuan dan tanah dari hasil sisa pengerusan aktivitas pertambangan) sehingga membuat proses akuisisi sebuah perusahaan melambat, pembuangan limbah tambang ke sungai tanpa diolah sehingga menimbulkan pencemaran sungai seperti di Lebak, dan lubang sisa aktivitas tambang yang banyak terbengkalai di Kalimantan sehingga banyak mengakibatkan korban jiwa.
4. Masalahan sosial dari sektor pertambangan masih banyak terjadi seperti kasus pelanggaran hak ulayat dari adat tertentu dan berbagai kasus kematian akibat lubang sisa tambang yang terbengkalai di Kalimantan juga ditanggapi dengan lalai oleh perusahaan dan pemerintah.
5. Masih banyak perusahaan pertambangan yang tidak transparan dalam publikasi informasi yang dimiliki mencakup pengungkapan *sustainability report*.

#### 1.2.2. Pembatasan Masalah

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan-perusahaan pertambangan yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017.
2. Penelitian ini menggunakan laporan tahunan perusahaan yang merangkap dengan *sustainability report* maupun yang menerbitkan *sustainability report* secara terpisah selama tahun 2015-2017.
3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu *sales growth*, *return on asset*, *debt to equity ratio* dan satu variabel dependen yaitu *sustainability report*.
4. Penelitian ini menggunakan indikator khusus GRI G4 sebagai indeks dari bobot laporan tahunan yang merangkap dengan *sustainability report* maupun *sustainability report* yang terpisah.

#### 1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah *sales growth*, *return on assets*, dan *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report* secara simultan ?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report* secara parsial ?
3. Apakah *return on assets* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report* secara parsial ?
4. Apakah *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report* secara parsial ?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *sales growth*, *return on assets*, dan *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report* secara simultan.
2. Untuk mengetahui *sales growth* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report* secara parsial.
3. Untuk mengetahui *return on assets* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report* secara parsial.
4. Untuk mengetahui *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report* secara parsial.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan  
Untuk bisa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pentingnya konsep *triple bottom line* sehingga mau dan mampu mengungkapkan laporan keuangan dengan transparan dan diiringi dengan dibuatnya *sustainability report*.
2. Bagi investor  
Untuk bisa mempertimbangkan perusahaan yang akan dibeli sahamnya sehingga dapat memperkirakan kebutuhan *sustainability report* yang diterbitkan oleh perusahaan agar lebih yakin bahwa perusahaan tersebut tidak membuat masalah lingkungan maupun tidak terlibat dalam masalah lingkungan.
3. Bagi pemerintah  
Untuk bisa mempertimbangkan lebih lanjut dalam pemberian izin aktivitas pertambangan dan mempertimbangkan ketetapan perusahaan dalam melakukan pertanggungjawaban sosial.
4. Bagi penelitian selanjutnya  
Untuk menambah wawasan dan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian terhadap *sustainability report*.